

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Kendal



Pemerintah Kabupaten Kendal

2024



**PERNYATAAN REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kendal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kendal, 25 Maret 2024
Inspektur Daerah Kabupaten Kendal


TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.
NIP. 19640923 199011 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal Tahun 2023. LKjIP Kabupaten Kendal disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara perencanaan, kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan, dan berguna untuk mengukur kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga dapat dijadikan tolok ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan. Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja yang mengacu pada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi RPJMD 2021 –2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal Tahun 2023 ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dalam periode RPJMD 2021 – 2026, yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal, sekaligus dijadikan sebagai sarana untuk memaparkan secara obyektif capaian program dan kegiatan dengan rumusan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (*Renstra*).

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalamnya yaitu masyarakat, swasta, dan

pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan pengawasannya.

Selanjutnya diharapkan LKjIP Kabupaten Kendal tahun 2023 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan rasa memiliki, kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Kendal selanjutnya menjadi lebih baik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Kendal Tahun 2023.

Kendal, 24 Maret 2024
BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO, B.Sc.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Kendal	3
C. Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2022	11
Bab II Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis 2021 - 2026	15
B. Indikator Kinerja Utama 2021 – 2026	19
C. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	20
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	25
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya	34
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target RPJMD	36
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya Berbanding Hasil	37
E. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja	47
F. Analisa Permasalahan dan Rekomendasi	60
G. Kinerja Keuangan	73
Bab IV Penutup	78
Lampiran	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam hal penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Kendal Tahun 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban kemajuan penyelenggaraan pemerintah yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku, serta sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja terwujudnya *Good Governance*.

Kondisi Internasional pasca pandemi *Covid-19*, masih dirasakan hingga penghujung tahun 2021 bahkan sampai laporan ini ditulis, menjadi salah satu alasan sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal mengangkat **Isu Strategis** yang

tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Pemulihan kondisi sosial dan perekonomian Kabupaten Kendal;
2. Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar;
3. Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0;
4. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah;
5. Konektifitas antar wilayah yang belum optimal, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal;
6. Belum Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, *Smartcity*, dan inovasi daerah;
7. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum menuju Pencapaian Indek Desa Membangun;
8. Munculnya Pandemi *COVID 19*; dan
9. Penanggulangan Kemiskinan.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah “*Competitive Kendal*” dengan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 diprioritaskan pada “**Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal**”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0..

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

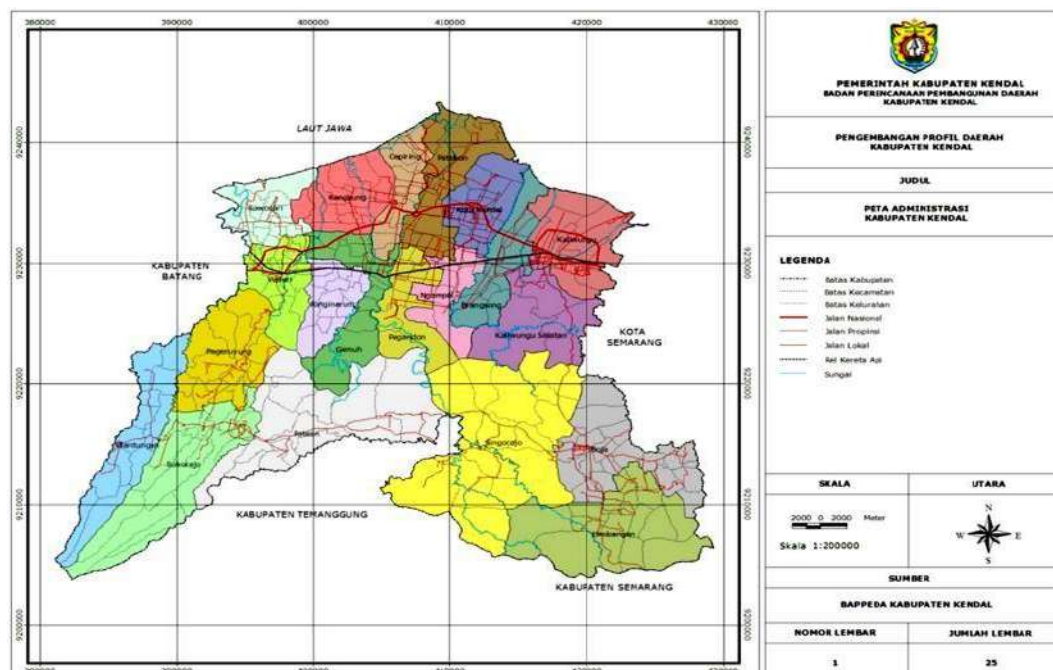
sejalan dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

B. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kendal masuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di jalur utama Pantai Utara Pulau Jawa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantura, memiliki luas wilayah 1.002,23 Km². Posisi Kabupaten Kendal berada di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 yang terdiri dari 266 desa dan 20 kelurahan. Pembagian luas dan wilayah administrasi Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan
Kabupaten Kendal Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	LUAS (km²)
1	2	3
1.	Plantungan	48,82
2.	Sukorejo	76,04
3.	Pageruyung	51,44
4.	Patean	92,93
5.	Singorojo	119,32
6.	Limbangan	71,71
7.	Boja	64,11
8.	Kaliwungu	47,72
9.	Kaliwungu Selatan	65,19
10.	Brangsong	34,54
11.	Pegandon	31,13
12.	Ngampel	33,88
13.	Gemuh	51,43
14.	Ringinarum	23,50
15.	Weleri	30,29
16.	Rowosari	32,60
17.	Kangkung	38,99
18.	Cepiring	30,07
19.	Patebon	44,31
20.	Kendal	27,50

(Sumber : Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kendal tahun 2023)

2. Letak dan Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada 109,40' – 110,18' Bujur Timur dan 6,32' – 7,24' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa

Timur : Kota Semarang

Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung

Barat : Kabupaten Batang

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km.

3. Topografi

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 m dpl. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s.d 10 m dpl. Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah dengan ketinggian 4 m dpl.

4. Demografis

Data kependudukan baik dari sisi jumlah, jenis, komposisi, persebaran, serta perubahannya berguna untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, maupun bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya seperti infrastruktur, perumahan, pangan, pasar, pertokoan, maupun keperluan sekunder lainnya.

Dalam kaitannya dengan aspek perencanaan, data kependudukan akan digunakan untuk menentukan adanya kekuatan, kelemahan, maupun strategi untuk memecahkan masalah yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Data kependudukan Kabupaten Kendal selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan se-Kabupaten Kendal
Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Plantungan	17.752	17.007	34.759
2.	Pageruyung	19.785	19.041	38.826
3.	Sukorejo	32.899	31.554	64.453
4.	Patean	28.436	27.905	56.341
5.	Singorojo	28.425	27.841	56.266
6.	Limbangan	18.697	18.657	37.354
7.	Boja	43.368	43.010	86.378
8.	Kaliwungu	33.928	33.823	67.751
9.	Brangsong	27.140	26.786	53.926
10.	Pegandon	20.536	20.605	41.141
11.	Gemuh	28.054	27.859	55.913
12.	Weleri	32.239	32.003	64.242
13.	Cepiring	27.871	28.237	56.108
14.	Patebon	32.201	32.107	64.308
15.	Kendal	31.083	31.163	62.246
16.	Rowosari	28.913	28.596	57.509
17.	Kangkung	26.905	26.899	53.804
18.	Ringinarum	20.316	20.113	40.429
19.	Ngampel	19.419	19.343	38.762
20.	Kaliwungu Selatan	26.995	26.643	53.638

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Tahun 2023

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk se-Kabupaten Kendal
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2023

PENDUDUK	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	500.446	511.537	517.497	524.397	537.626	544.962
Perempuan	491.240	500.402	504.988	514.466	531.969	539.192
Jumlah	991.686	1.011.939	1.022.485	1.038.863	1.069.595	1.084.154

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Tahun 2023

5. Capaian Indikator Makro

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan indikator makro sebagai berikut :

- a) Capaian pembangunan manusia pada tahun 2023 yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,86, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 73,19;
- b) Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,56 sedikit turun dari tahun 2022, yang mencapai sebesar 5,69;
- c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai 33.428,96 miliar rupiah, meningkat pada tahun 2023 yang mencapai 35.286,23 miliar rupiah;
- d) Penduduk miskin tahun 2022 sebesar 9,48% dan dapat diturunkan pada tahun 2023 menjadi sebesar 9,39%;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 sebesar 7,34% dapat diturunkan pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,76%.

6. Gambaran Umum Organisasi

- a) Kedudukan Pemerintah Kabupaten Kendal

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa kedudukan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagai Daerah Otonom. Kedudukan yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal dipimpin oleh Bupati dibantu Wakil Bupati dan Perangkat Daerah. Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal diatur melalui Peraturan Daerah

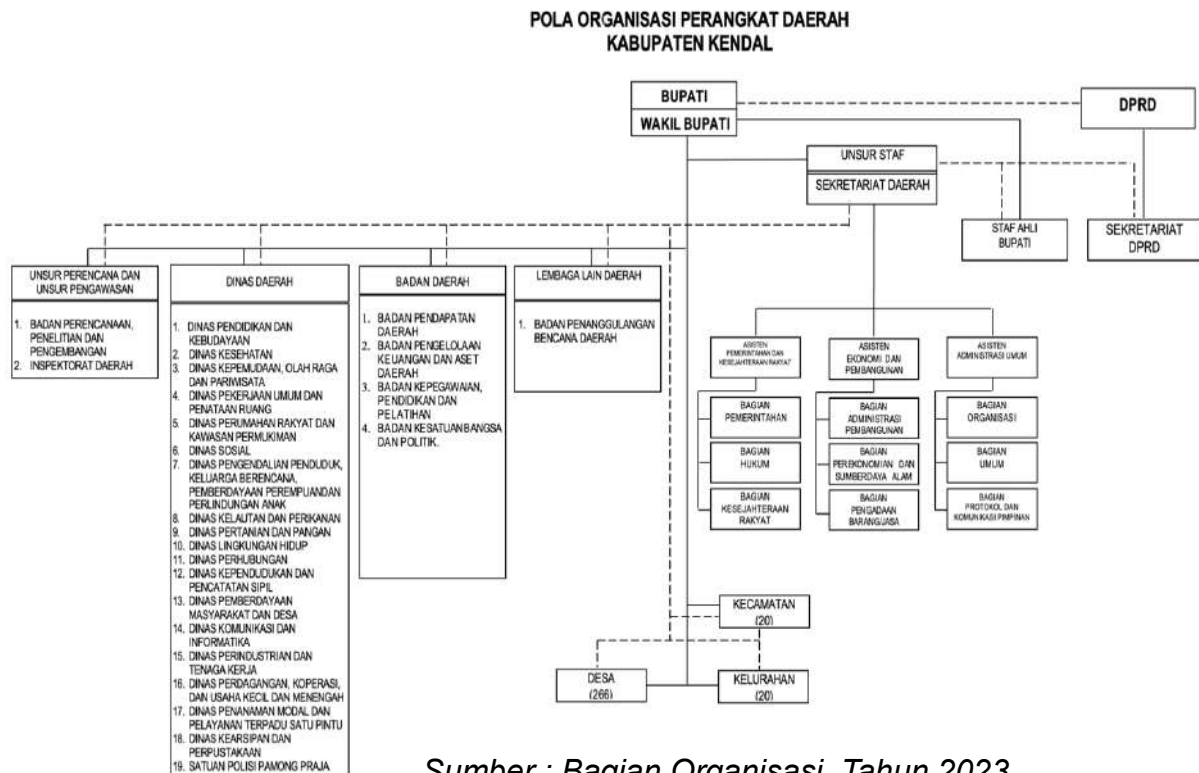
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, yang terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretaris DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Badan Daerah
- 5) Dinas Daerah
- 6) Kecamatan

Adapun secara lengkap struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal tersaji pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016



Sumber : Bagian Organisasi, Tahun 2023

c) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki 9.306 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari :

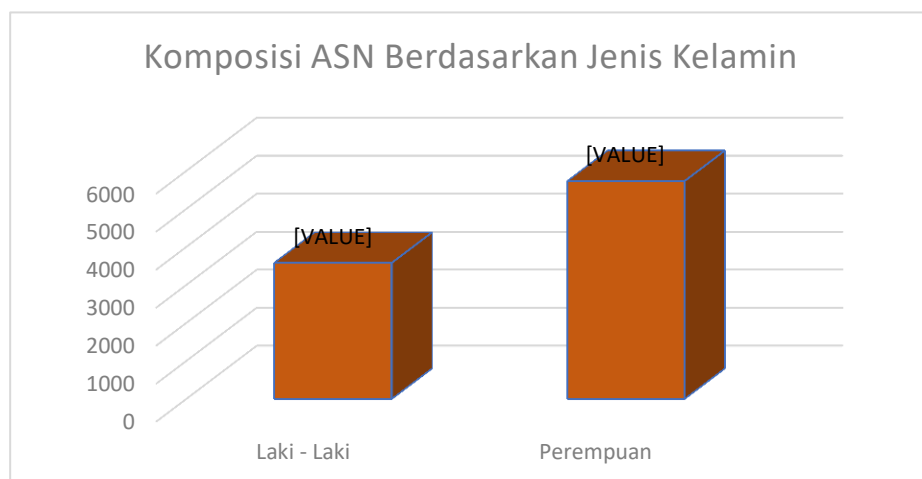
- 1) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.858 orang
- 2) Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 490 orang
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 1.958 orang

Berdasarkan data SIMPEG dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang diolah oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal pada bulan Maret 2023, bahwa jumlah berdasarkan jenis kelamin, untuk ASN berjenis kelamin laki – laki sejumlah 3.577 orang dan ASN berjenis kelamin perempuan sejumlah 5.729 orang.

Kemudian ASN ditinjau dari jabatannya, terdiri dari JPT Pratama sejumlah 29 orang, Administrator 153 orang, Pengawas 277 orang dan Fungsional 4.550 orang serta Pelaksana 4.297 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan fungsional paling banyak sesuai dengan semangat atas keterlaksanaan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan jabatan struktural ke dalam fungsional.

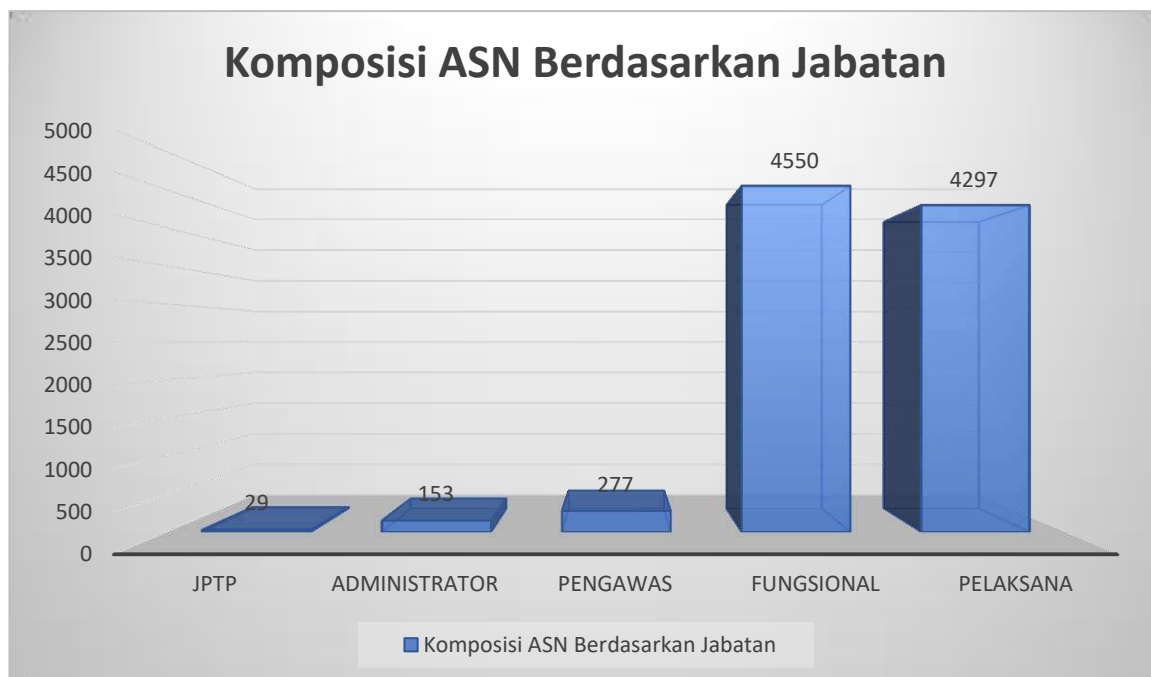
Untuk melihat komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada table di bawah ini sebagai berikut :

Grafik 1.1



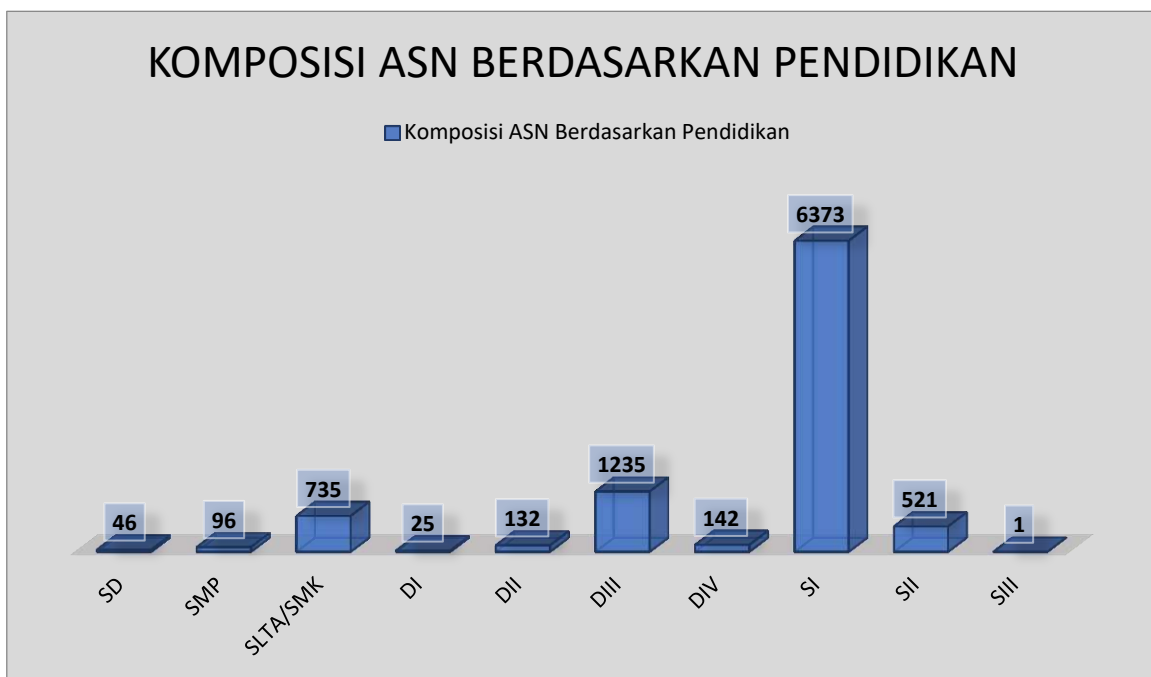
Sumber : SIMPEG BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2023

Grafik 1.2



Sumber : SIMPEG BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2023

Grafik 1.3



Sumber : SIMPEG BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2023

C. Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2022

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada ***“Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”***. Fokus dari pembangunan tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Kabupaten Kendal tahun 2023, berikut disajikan tabel program prioritas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 1.4 Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2022 Dan Program Prioritas

NO	PRIORITAS TAHUN		FOKUS PEMBANGUNAN	UNSUR	PROGRAM	URUSAN
1.	“Competitive Kendal” Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal	“Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”.	mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.	Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	PENDIDIKAN
				Kebudayaan dan karakter	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	KEBUDAYAAN
					Program Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN

NO	PRIORITAS TAHUN		FOKUS PEMBANGUNAN	UNSUR	PROGRAM	URUSAN
				Kesehatan	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	KESEHATAN
				Keluarga Berencana	• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pengendalian Penduduk	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Olahraga	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) • Program Perlindungan Khusus Anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PRIORITAS TAHUN		FOKUS PEMBANGUNAN	UNSUR	PROGRAM	URUSAN
				Kualitas ASN	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumberdaya	KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
				Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja Program pelatihan kerja dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN

Sumber: RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Untuk periode 2021 - 2026 RPJMD Kabupaten Kendal disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal 2021 - 2026.

1. Visi 2021 - 2026

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kendal, serta peluang, tantangan, dan isu strategis, untuk periode 2021 - 2026 RPJMD Kabupaten Kendal menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu : **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.”**

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

1. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

2. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

3. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

4. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

2. Misi 2021 - 2026

Rumusan misi merupakan hal penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

a. Misi 1 :

Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

Tujuan 1 :

Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah;
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
3. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM;

5. Meningkatnya nilai investasi;
6. Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Misi 2 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur.

Sasaran :

1. Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan *responsif gender*.

c. Misi 3 :

Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.

Tujuan 3 :

1. Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah;
3. Meningkatnya kemandirian desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya toleransi, keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya;
3. Meningkatnya kualitas desa.

d. Misi 4 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tujuan 4 :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah;
2. Meningkatnya cakupan universal akses;
3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

e. Misi 5 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Tujuan 5

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata Kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel;
2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021 - 2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060 / 74 / 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022 – 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR	Kondisi Awal 2021	Target	
			2025	2026
1.	Pertumbuhan ekonomi	2,5-3,2	5,43-5,76	5,49-5,82
2.	Persentase kontribusi pariwisata dalam PAD	0,26	0,44	0,45
3.	Tingkat pengangguran terbuka	7,14	5,23	5,15
4.	Angka kemiskinan	9,89-9,79	9,19-8,89	8,89-8,69
5.	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	3.1	3.55	3.6
6.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	72,61	76,61	77,61
7.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,95	93,3	93,4
8.	Angka kriminalitas	150	146	145
9.	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100	100	100
10.	Indeks Desa Membangun	0,7095	0,7250	0,7265
11.	Cakupan infrastruktur wilayah Yang berkualitas	80,158	84,344	85,490
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,82	59,42	59,82
13.	IRBI (Indek Resiko Bencana)	124,57	124,57	124,57
14.	Indek Reformasi Birokrasi	64,41	69,2	69,5
15.	Nilai SAKIP	68,55	76,55	78,55
16.	Indek SPBE	2,76	3,91	3,91

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

C. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	1,5
		Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	0,43
		Prosentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	18
		Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	3,45
		Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	0,5
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	87,3
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	78,58

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Prosentase UMK yang berkembang	5,5
5	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	2,75
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahteraan I	19,87
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	13,4
		rata -rata lama sekolah	8,05
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,73
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,1
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	0
		Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	1
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100
		Persentase cagar budaya yang diselestarikan	100
12	Meningkatnya kualitas desa	Jumlah Desa Mandiri	2
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	92,78
		Persentase drainase kondisi baik	78,15
		Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	69,55
		Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,00
14	Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase Capaian <i>Universal Acces</i>	96,17
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas	0,79
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54,44
		Indeks kualitas udara	72,88
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,43
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	63
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	72,55
		Kasus Korupsi	0
		Opini BPK	WTP
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme ASN	76,7
		Indeks SPBE	3,43
		Indek kematangan kelembagaan	32,9
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	87,77

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kendal dianggarkan melalui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal dengan rincian sebagai berikut : **Anggaran Pendapatan** pada tahun 2023 sebesar Rp2.450.177.134.716,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp528.439.483.233,00; Pendapatan Transfer senilai Rp1.913.737.651.493,00; Lain-lain Pendapatan yang sah senilai Rp8.000.000.000,00. **Anggaran Belanja** pada tahun 2023 sebesar Rp2.575.391.457.549,00 dengan rincian Belanja Operasi senilai Rp1.836.310.864.716,00; Belanja Modal senilai Rp321.594.585.437,00; Belanja Tak Terduga senilai Rp5.250.000.000,00 dan Belanja Transfer senilai Rp412.236.007.396,00. **Anggaran Pembiayaan** pada tahun 2023 sebesar Rp125.214.322.833,00 dengan rincian Penerimaan Pembiayaan senilai Rp151.214.322.833,00; Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp26.000.000.000,00.

Tabel 2.3
Pendapatan Transfer

No.	Pendapatan Transfer	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.702.481.764.636,00	1.709.200.397.202,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.255.886.857,00	191.950.674.439,00
Jumlah		1.913.737.651.493,00	1.901.151.071.641,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

Tabel 2.4
Belanja Daerah

No.	Belanja Daerah	2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Operasi	1.836.310.864.716,00	1.760.319.129.951,0	95,86
2.	Belanja Modal	321.594.585.437,00	305.965.196.198,00	95,14
3.	Belanja Tak Terduga	5.250.000.000,00	3.319.381.024,00	63,23
4.	Belanja Transfer	412.236.007.396,00	405.248.396.377,00	98,30
Jumlah		2.575.391.457.549,00	2.474.852.103.550,00	96,10

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Kendal selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, dan PK Tahun 2023.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1: Kategori Capaian Indikator

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari atau sama dengan 91%	Sangat Tinggi
2	76% sampai dengan $\leq 90\%$	Tinggi
3	66 % sampai dengan $\leq 75\%$	Sedang
4	51% sampai dengan $\leq 65\%$	Rendah
5	Kurang dari atau sama dengan 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Untuk menilai capaian pada setiap sasaran, secara matematis dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Banyaknya indikator dengan predikat}}{\text{Jumlah indikator sasaran}} \times X \text{ Mean} \times$$

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kabupaten Kendal dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor: 060/74/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintahan.

A

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kendal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. sebagaimana table 3.2 dan tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		2023			
			2021	2022	Target	Realisasi Capaian	%	Kategori
	Misi I : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>).							
1	Pertumbuhan ekonomi	%	2,5-3,2	5,69	5,33-5,64	5,56	101,44	Sangat Tinggi
2	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,26	0,27	0,43	0,30	69,77	Sedang
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,14	7,34	5,63	5,76	102,31	Sangat Tinggi
4	Angka Kemiskinan	%	9,89-9,79	9,48	9,59-9,39	9,39	100	Sangat Tinggi
5	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	2,53	3,45	2,91	84,35	Tinggi
	Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut <i>revolusi industri 4.0</i>							
6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	72,61	73,19	74,61	73,86	98,99	Sangat Tinggi
7	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,95	93,3	93,1	93,79	100,74	Sangat Tinggi
	Misi III : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.							

8	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	150	143	148	147	99,32	Sangat Tinggi
9	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
10	Indek Desa Membangun	indeks	0,719	0,7299	0,722	0,73628	101,98	Sangat Tinggi
Misi IV : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.								
11	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	80,158	82,47	82,05	75,17	91,61	Sangat Tinggi
12	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,82	57,72	58,62	57,75	98,52	Sangat Tinggi
13	IRBI (Indek Resiko Bencana)	Indeks	124,57	100,4	124,57	91,74	73,65	Sedang
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.								
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,41	66,51	67,75	66,71	98,46	Sangat Tinggi
15	Nilai SAKIP	nilai	68,55	67,83	72,55	68,97	95,07	Sangat Tinggi
16	Indeks SPBE	indeks	3,27	3,27	3,43	2,95	86,01	Tinggi

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal Tahun 2023

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

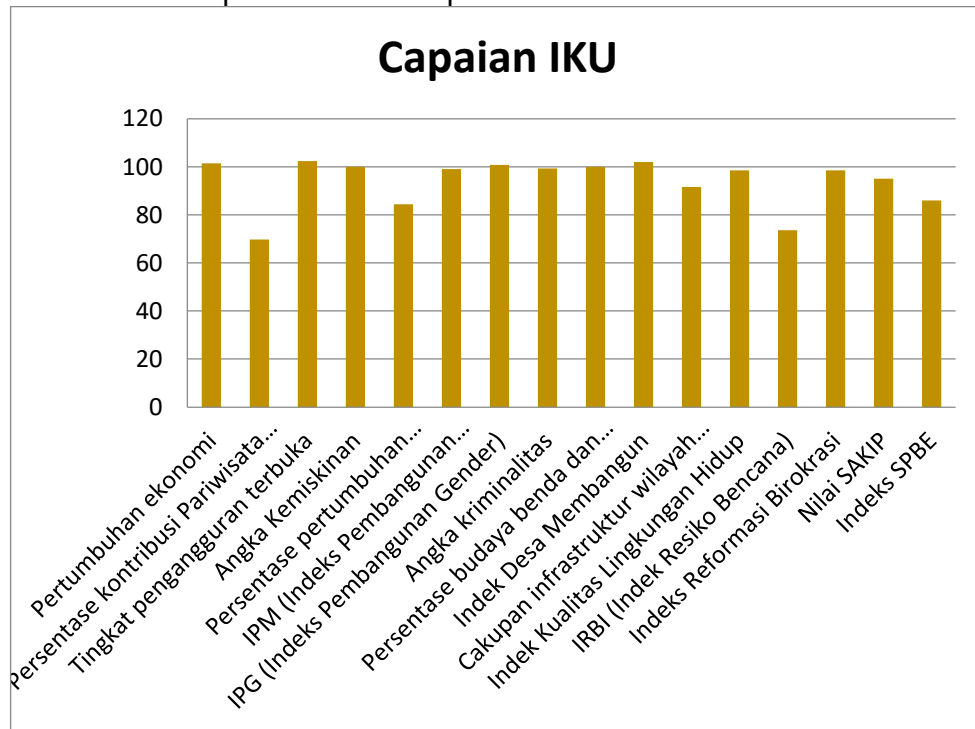
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	1,5	8,9	593,33
		Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	0,43	0,30	69,76
		Prosentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	18	36	200
		Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	3,45	2,72	78,84
		Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	0,5	6,12	1224
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	87,3	96,9	110,99
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	78,58	76,93	97,90
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Prosentase UMK yang berkembang	5,5	6,54	118,9
5	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	2,75	6,398	232,65
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahteraan I	19,87	19,87	100
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	13,4	12,99	96,94
		rata -rata lama sekolah	8,05	7,73	96,02
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,73	74,58	99,80
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,1	93,79	100,74
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	0	0	100
		Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	1	47,08	4708
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100	100	100
		Persentase cagar budaya yang diselestarikan	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(5)	(6)
12	Meningkatnya kualitas desa	Jumlah Desa Mandiri	3	4	133,33
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	92,78	83,113	89,58
		Persentase drainase kondisi baik	78,15	76,51	97,9
		Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	69,55	65,9	94,75
		Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,00	86,00	102,38
14	Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase Capaian Universal Acces	96,17	96,8	100,65
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas	0,79	0,9	113,92
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54,44	44,29	81,35
		Indeks kualitas udara	72,88	79,56	109,16
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,43	40,52	102,76
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	63	70	111,1
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	72,55	68,97	95,06
		Kasus Korupsi	0	0	100
		Opini BPK	WTP	WTP	100
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme ASN	76,7	79,02	103,02
		Indeks SPBE	3,43	2,95	86,0
		Indek kematangan kelembagaan	32,9	38,18	116,04
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	87,77	92,6	105,5

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal Tahun 2023

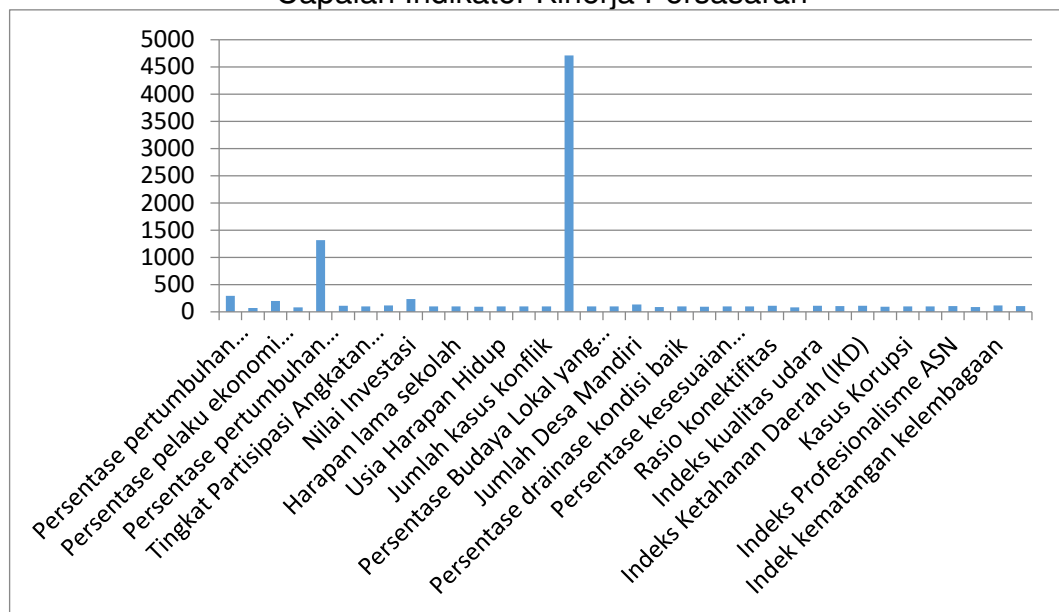
Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja persasaran diperoleh rata-rata capaian 274,11% sedikit meningkat dari capaian tahun 2022 yang rata-rata capaiannya 227,98%. Peningkatan paling besar adalah pada sasaran **Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat** pada indikator “Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban” dikarenakan adanya penurunan gangguan keamanan dan ketertiban seiring berakhirnya masa pandemi.

Grafik 3. 1
Capaian IKU Kabupaten Kendal Tahun 2023



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2023

Grafik 3.2
Capaian Indikator Kinerja Persasaran



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2023 diolah)

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Kendal Tahun 2023, telah ditetapkan 20 (dua puluh) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah	5 indikator
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 indikator
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1 indikator
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	1 indikator
5	Meningkatnya nilai investasi	1 indikator
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1 indikator
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	2 indikator
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 indikator
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	1 indikator
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2 indikator
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	2 indikator
12	Meningkatnya kualitas desa	1 indikator
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	4 indikator
14	Meningkatnya cakupan universal akses	1 indikator
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 indikator
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3 indikator
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1 indikator
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	3 indikator
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	3 indikator
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1 indikator

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2023 diolah)

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumlah Sasaran
1	Sangat Baik	>85	20
2	Baik	70 – 85	-
3	Cukup	55 – 69	-
4	Kurang	50 – 55	-
5	Sangat Kurang	<50	-
6	N/a		-
	Jumlah		20

Sumber: Bagian Organisasi diolah

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indika- tor	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.99 Sangat Kurang	50.00- 64.99 Kurang	65.00- 74.99 Cuku p	75.00 - 89.99 Baik	>90 Sanga t Baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah	5	804,67%					Sangat Baik
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	110.99%					Sangat Baik
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1	97,90%					Sangat Baik
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	1	118,91%					Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indika- tor	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.99 Sangat Kurang	50.00- 64.99 Kurang	65.00- 74.99 Cuku p	75.00 - 89.99 Baik	>90 Sanga t Baik
5	Meningkatnya nilai investasi	1	232,65%					Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1	100%					Sangat Baik
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	2	96,48%					Sangat Baik
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	99,79%					Sangat Baik
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	1	100,74%					Sangat Baik
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2	2404%					Sangat Baik
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	2	100%					Sangat Baik
12	Meningkatnya kualitas desa	1	133,33%					Sangat Baik
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	4	95,98%					Sangat Baik
14	Meningkatnya cakupan universal akses	1	100,65%					Sangat Baik
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	113,92%					Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.99 Sangat Kurang	50.00-64.99 Kurang	65.00-74.99 Cukup	75.00 - 89.99 Baik	>90 Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	92,06%					Sangat Baik
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1	111,11%					Sangat Baik
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	3	97,53%					Sangat Baik
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	3	109,53%					Sangat Baik
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	105,50%					Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi, Tahun 2023

B

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Berikut ini tabel pengukuran kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

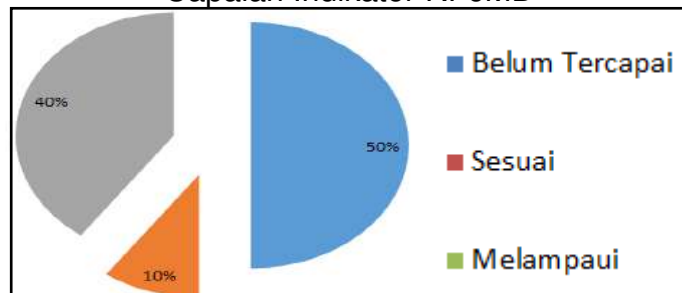
Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 - 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		2023			
			2021	2022	Target	Realisasi Capaian	%	Kategori
	Misi I: Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>).							
1	Pertumbuhan ekonomi	%	2,5-3,2	5,69	5,33-5,64	5,56	101,44	Melampaui
2	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,26	0,27	0,43	0,30	69,77	Belum Tercapai
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,14	7,34	5,63	5,76	102,31	Melampaui
4	Angka Kemiskinan	%	9,89-9,79	9,48	9,59-9,39	9,39	100	Sesuai

5	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	2,53	3,45	2,91	84,35	Belum Tercapai
Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0								
6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	72,61	73,19	74,61	73,86	98,99	Belum Tercapai
7	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,95	93,3	93,1	93,79	100,74	Melampaui
Misi III: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.								
8	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	150	143	148	147	99,32	Belum Tercapai
9	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100,00	Sesuai
10	Indek Desa Membangun	indeks	0,719	0,7299	0,722	0,73628	101,98	Melampaui
Misi IV: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.								
11	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	80,158	82,47	82,05	75,17	91,61	Belum Tercapai
12	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,82	57,72	58,62	57,75	98,52	Belum Tercapai
13	IRBI (Indek Resiko Bencana)	Indeks	124,57	100,4	124,57	91,74	73,65	Belum Tercapai
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagiparticipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.								
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,41	66,51	67,75	66,71	98,46	Belum Tercapai
15	Nilai SAKIP	nilai	68,55	67,83	72,55	68,97	95,07	Belum Tercapai
16	Indeks SPBE	indeks	3,27	3,27	3,43	2,95	86,01	Belum Tercapai

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2023 diolah

Grafik 3.3
Capaian Indikator RPJMD



Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal 2023

C

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target RPJMD

Berikut ini tabel pengukuran kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Target RPJMD

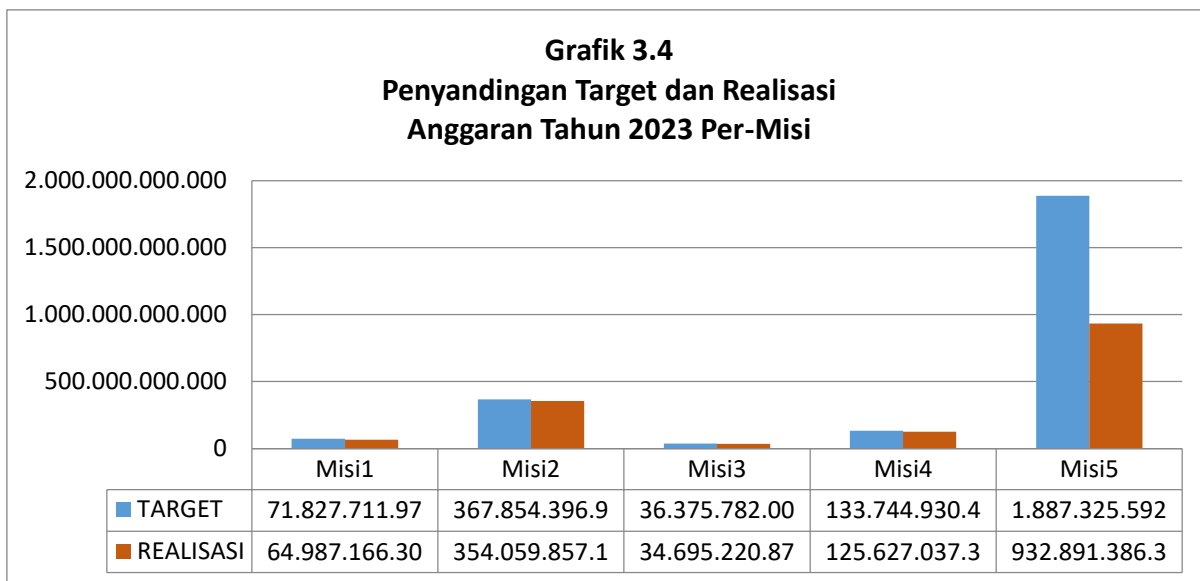
Misi	Indikator	Satuan	Target akhir RPJMD 2021-2026	Tahun 2023		Capaian RPJMD 2021-2026 sd. 2023		
				Target	Realisasi	Realisasi	Persentase	Status Capaian
Misi I: Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>).								
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,49-5,82	5,33-5,64	5,56	5,56	101,27	Melampaui
2	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,45	0,43	0,30	0,30	66,66	Belum Tercapai
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,15	5,63	5,76	5,76	111,84	Melampaui
4	Angka Kemiskinan	%	8,89-8,69	9,59-9,39	9,39	9,39	94,67	Belum Tercapai
5	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,6	3,45	2,91	2,91	80,83	Belum Tercapai
Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0								
6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	77,61	74,61	73,86	73,86	95,19	Belum Tercapai
7	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	93,4	93,1	93,79	93,79	100,42	Melampaui
Misi III: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.								
8	Angka kriminalitas	Per 100.00 penduduk	145	148	147	147	101,38	Melampaui
9	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100,00	Sesuai
10	Indek Desa Membangun	indeks	0,7265	0,722	0,73628	0,73628	101,32	Melampaui
Misi IV: Mewuiudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung								

dan kelestarian lingkungan.								
11	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	85,490	82,05	75,17	75,17	87,93	Belum Tercapai
12	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,82	58,62	57,75	57,75	96,54	Belum Tercapai
13	IRBI (Indek Resiko Bencana)	Indeks	124,57	124,57	91,74	91,74	73,65	Belum Tercapai
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.								
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,5	67,75	66,71	66,71	95,98	Belum Tercapai
15	Nilai SAKIP	nilai	78,55	72,55	68,97	68,97	87,80	Belum Tercapai
16	Indeks SPBE	indeks	3,91	3,43	2,95	2,95	75,44	Belum Tercapai

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2023 diolah

D Analisis Efisiensi Sumber Daya Berbanding Hasil

D.1 Efisiensi Sumber Daya



Sumber: Bagian Organisasi, Tahun 2023

Pengukuran capaian dan efisiensi atas visi-misi yang terjabarkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka pengukurannya dilakukan melalui capaian Tujuan, Sasaran dan Program-program yang telah dilaksanakan pada :

Misi pertama, memuat 2 (dua) Tujuan, alokasi anggaran pada Tujuan ke-1 pada tahun 2023 sebesar Rp50.739.074.254,- dengan realisasi Rp46.711.152.823,96,- sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.027.921.430,04,- atau 7,94%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - c. Program Pemasaran Pariwisata
 - d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - g. Program Penyuluhan Pertanian
 - h. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - i. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - j. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - k. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - l. Program Pengembangan Ekspor
 - m. Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-2 pada tahun 2023 sebesar Rp21.088.637.723,00,- terealisasi Rp18.276.013.481,00,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.812.624.242,- atau 13,4%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- c. Program Hubungan Industrial
 - d. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - f. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM, dan dilaksanakan melalui program :
- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - b. Program Pengembangan UMKM
3. Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial, dan dilaksanakan melalui program :
- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Misi kedua, terdapat 1 (satu) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-3 pada tahun 2023 sebesar Rp367.854.396.996,- terealisasi Rp354.059.857.108,65,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp13.794.539.887,35,- atau 3,75%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program pengelolaan pendidikan
 - b. Program Pengembangan Kebudayaan
 - c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - d. Program Pembinaan Perpustakaan
- 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - d. Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB)

- e. Program Pengendalian Penduduk
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - d. Program Perlindungan Khusus Anak

Misi ketiga, terdapat 3 (tiga) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-4 pada tahun 2023 sebesar Rp36.375.782.000,- terealisasi Rp34.695.220.871,6,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.680.561.128,4,- atau 4,62%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut :

“Meningkatnya toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat”, yang dilaksanakan melalui program :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- c. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-5 pada tahun 2023 sebesar Rp 2.139.100.000,00,- terealisasi Rp1.889.457.505,00,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp249.642.495,- atau 11,67%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya”, yang dilaksanakan melalui program :

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-6 pada tahun 2023 sebesar Rp 6.304.035.992,00,- terealisasi Rp6.181.142.335,00,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp122.893.657,- atau 1,95%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas desa”, yang dilaksanakan melalui program :

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Misi keempat, terdapat 2 (dua) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-7 pada tahun 2023 sebesar Rp115.965.178.404,- terealisasi Rp110.259.691.626,52,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.705.486.777,48,- atau 4,92%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penyelenggaraan Jalan
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Meningkatkan cakupan universal akses, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - c. Program Pengembang Perumahan
 - d. Program Kawasan Permukiman
 - e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan dilaksanakan melalui program :

“Penyelenggaraan LLAJ”.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-8 pada tahun 2023 sebesar Rp17.779.752.000,00,00,- terealisasi Rp15.367.345.718,00,- sehingga terdapat

efisiensi anggaran sebesar Rp2.412.406.282,- atau 13,57%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - b. Program Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. dan dilaksanakan melalui program : “Program Penanggulangan Bencana”.

Misi kelima, terdapat 1 (satu) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-9 pada tahun 2023 sebesar Rp1.887.325.592.199,- terealisasi Rp932.891.386.323,97,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 954.434.205.875,03,- atau 50,57%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - c. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - e. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - f. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - g. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - h. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - i. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Kepegawaian Daerah
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - c. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - d. Program Pengelolaan Arsip
 - e. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
 - f. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - g. Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - j. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - k. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - l. Program Pengembangan Sumberdaya
 - m. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - n. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik. dan dilaksanakan melalui program :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil
 - c. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

D.2. Sumberdaya Pendapatan Daerah

Pendapatan TA 2023 terealisasi senilai Rp2.453.076.102.925,83 atau mencapai 100,12% dari target senilai Rp2.450.177.134.716,00. Realisasi pendapatan mengalami peningkatan senilai Rp187.722.178.236,10 atau 7,65% jika dibandingkan dengan TA 2022 senilai Rp2.265.353.924.689,73. Realisasi pendapatan berasal dari PAD senilai Rp543.918.935.935,83 sedangkan Pendapatan Transfer senilai Rp1.901.151.071.641,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp8.006.095.349,00. Perkembangan realisasi pendapatan selama lima (5) tahun terakhir di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal, Data Unaudited BPK Tahun 2023

Sumber pendapatan meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Daerah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	528.439.483.233,00	543.918.935.935,83	102,93	437.899.634.626,73
2	Pendapatan Transfer	1.913.737.651.493,00	1.901.151.071.641,00	99,34	1.819.497.040.63,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.000.000.000,00	8.006.095.349,00	100,08	7.957.250.000,00
Jumlah		2.450.177.134.716,00	2.453.76.102.925,83	100,12	2.265.353.924.689,73

Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Data Unaudited BPK Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 senilai Rp2.453.76.102.925,83 atau 100,12% dari anggarannya senilai Rp2.450.177.134.716,00 dan 107,77% dari realisasi TA 2022 senilai Rp2.265.353.924.689,73.

D.3. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp2.474.852.103.550,00 atau 96,10% dari anggaran yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.575.391.457.549,00. Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan Rp76.377.438.300,00 atau 3,05% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.499.014.019.249,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Belanja Operasi senilai Rp1.760.319.129.951,00, Belanja Modal senilai Rp305.965.196.198,00, Belanja Tidak Terduga senilai Rp3.319.381.024,00, dan realisasi belanja Transfer senilai Rp405.248.396.377,00. Perkembangan realisasi belanja sejak Tahun Anggaran 2018 disajikan pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019-2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Unaudited BPK Tahun 2023

Berdasarkan realisasi pendapatan senilai Rp2.453.076.102.925,83 dan realisasi Belanja Daerah senilai Rp2.474.852.103.550,00, dimana jumlah ini sudah

termasuk transfer maka terdapat defisit anggaran pada TA 2023 senilai Rp21.776.000.624,17. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2023 senilai Rp125.226.927.832,73, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp151.226.927.832,73 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp26.000.000.000,00. Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk SiLPA TA 2023 senilai Rp103.450.927.208,56.

Tabel 3.9

Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023

No	Belanja Daerah	2023		%	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.836.310.864.716,00	1.760.319.129.951,00	95,86	1.700.561.372.435,00
2	Belanja Modal	321.594.585.437,00	305.965.196.198,00	95,14	338.360.021.568,00
3	Belanja Tak Terduga	5.250.000.000,00	3.319.381.024,00	63,23	2.426.449.400,00
4	Belanja Transfer	412.236.007.396,00	405.248.396.377,00	98,30	457.666.175.846,00
Jumlah		2.575.391.457.549,00	2.474.852.103.550,00	96,10	2.499.014.019.249,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal Unaudited BPK RI Tahun 2023

D.4. Permasalahan dan Solusi

Realisasi target Pendapatan Daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi dan endemi yang masih berpengaruh pada keadaan ekonomi maupun sosial masyarakat. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain belum optimalnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah pengelola pajak daerah, Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya serta *stakeholder* pengampu pendapatan dalam hal keterpaduan data dan pengkoneksian sistem pengelolaan Pendapatan Daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain :

- a. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah melalui penyederhanaan prosedur pelayanan perpajakan dan terus memperbaiki serta menyempunakan sistem informasi perpajakan untuk lebih memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi daerah melalui perbaikan sarana prasarana maupun penerapan E-Retribusi secara bertahap.
- c. menyelenggarakan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
- d. melakukan sosialisasi/ penyuluhan kepada wajib pajak/ retribusi agar membayar pajak sesuai ketentuan dan penegakan disiplin pembayaran pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
- e. mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisa serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- f. meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah maupun antara Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya serta *stakeholder*, sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah terhadap optimalisasi pendapatan daerah.
- g. melakukan pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran (kanal pembayaran) serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan Bank Jateng, Kantor Pos, Indomaret, Tokopedia, *Gopay* dan agen Laku Pandai Bank Jateng.
- h. meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Perangkat Daerah pengampu Dana Transfer, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka optimalisasi pencairan Dana Transfer.

E

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

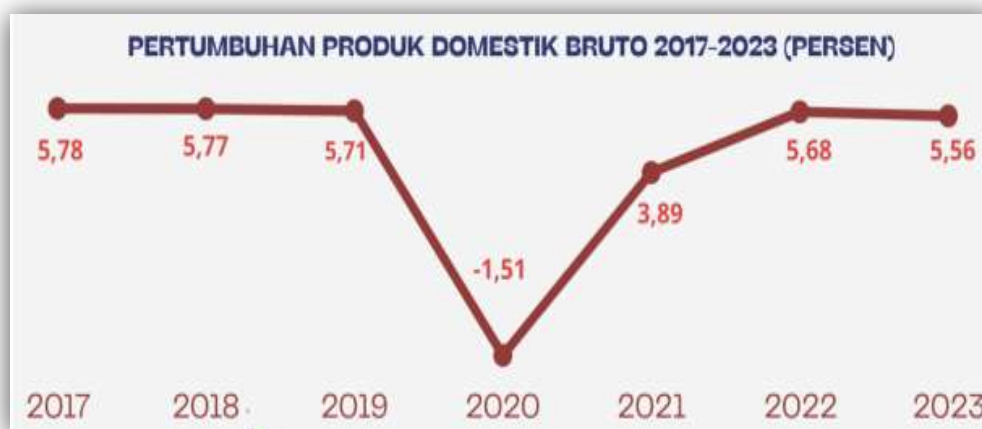
Capaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah

Capaian Kinerja Sasaran ini sebesar 804,67% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	1,5	8,9	593,33
		Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	0,43	0,30	69,77
		Persentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	18	36	200,00
		Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	3,45	2,72	78,84
		Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	0,5	6,12	1224,00

Grafik 3.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Tahun 2023

Pada sasaran ini industri pengolahan masih mendominasi kinerja ekonomi di Kabupaten Kendal, untuk mencapai indikator “*Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB*” dilaksanakan dengan **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**. Langkah-langkah dalam upaya pencapaiannya adalah

dengan meningkatkan intensitas serta pendampingan pasca pelatihan bagi usaha industri pengolahan terutama pasca pandemi *Covid-19*, serta melakukan kebijakan strategis dalam meningkatkan investasi melalui sinergitas *investment ecosystem* menuju *Competitive Kendal*.

Untuk mencapai indikator “*Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD*” dilaksanakan dengan **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata**. Capaian Indikator tersebut murni dari pendapatan 3 (tiga) obyek pariwisata yang dikelola pemerintah daerah yaitu Pantai Sendang Sikucing, Kolam Renang Boja, dan Curug Sewu, namun pembangunan dan pemeliharaan destinasi wisata tersebut belum berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Optimalisasi juga dilakukan dengan inovasi pemasaran antara lain dengan menyelenggarakan event-event seperti pertunjukan seni, memuat dalam konten-konten *Instagram* maupun majalah cetak lainnya, serta menyelenggarakan pameran di tingkat kabupaten, mengikuti pelaksanaan pameran provinsi maupun nasional. Kedepan penghitungan kontribusi PAD dari sektor pariwisata akan dikembangkan melalui pajak hotel, pajak resto, pajak hiburan maupun pajak keramaian umum lainnya serta retribusi dan pajak dari tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta.

Untuk mencapai indikator “*Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan*” dilaksanakan dengan **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**. Sertifikat *Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability* (CHSE) yang merupakan sertifikasi kesehatan sanitasi dan kesehatan lingkungan disekitar obyek wisata yang dipersyaratkan dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dan fasilitasi untuk memperoleh sertifikat HAKI atas kreatifitas pelaku ekonomi kreatif.

Untuk mencapai indikator “*Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB*” dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**. Langkah dan strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui

pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani, Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, dan peningkatan kapasitas pengolah ikan. Namun capaian kinerja ini lebih dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh bencana rob, perubahan kondisi alam, dan alih fungsi lahan pertanian.

Untuk mencapai indikator “*Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB*” dilaksanakan dengan ***Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pengembangan Ekspor, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***. Langkah strategis yang dilakukan dengan Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas ekspor, penataan izin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran pandemi *covid 19*, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen. Pertumbuhan UKM dan pelaku ekonomi kreatif turut mendorong capaian pertumbuhan perdagangan terutama perdagangan retail.

Capaian Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Sasaran ini, diukur dengan indikator “Skor Pola Pangan Harapan”, tercapai 111,00% dari target 87,3 dapat terealisasi 96,9. dilaksanakan dengan ***Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan***. Langkah strategi yang dilakukan adalah dengan menjaga ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang. Berdasarkan data konsumsi hasil survei SUSENAS tahun 2023. Adanya pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan. sehingga penduduk dapat mengakses pangan dengan harga murah dan terjangkau untuk mempertahankan dan memenuhi asupan kalori, selain itu adanya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, sehingga tercipta keragaman dan keseimbangan pangan. Kelemahan capaian kinerja

ini dipengaruhi oleh kurangnya diversifikasi pangan dan pembinaannya kepada masyarakat.

Capaian Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

Indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran ini adalah “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”, dengan target 78,58, dan dapat terealisasi 76,93 sehingga capaiannya 97,90%. dilaksanakan dengan ***Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Penempatan Tenaga Kerja.***

Langkah strategi yang dilakukan adalah dengan upaya menurunkan pengangguran melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan perselisihan tenaga kerja. Capaian kinerja ini dikarenakan belum optimalnya program “Kendal Karier”, disamping selisih antara jumlah lowongan kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah pelamar kerja, termasuk afirmasi pekerja lokal dengan jumlah pekerja yang diperlukan di KIK, dimana setiap perusahaan wajib menyerap minimal 70% tenaga kerja lokal. Namun demikian, angka tersebut belum optimal, mengingat capaian partisipasi angkatan kerja masih dibawah 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 4: Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM

Salah satu Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur adalah “Prosentase UMK yang berkembang” dari target tahun 2023 sebesar 5,5 terealisasi 6,54 atau tercapai 118,91%. dilaksanakan dengan ***Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM),- Program Pengembangan UMKM.*** Langkah dan strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas usaha mikro melalui fasilitasi izin usaha dan PIRT, peningkatan akses permodalan dengan koperasi, pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM dalam menciptakan produk UMKM yang unggul dan berdaya saing;

Peningkatan kapasitas UMKM untuk berkembang skala usahanya dari Mikro menjadi Usaha Kecil; dan peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi UMKM yang mudah diakses

Capaian Sasaran 5: Meningkatnya nilai investasi

Sasaran ini pada tahun 2023 ditargetkan 2,75 T dan dapat terealisasi 6,398 T atau tercapai 232,65% melalui **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan Program Pelayanan Penanaman Modal**, Investasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat, seiring dengan berubahnya pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta didukung beroperasinya Pelabuhan Kendal. Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan ditetapkannya KIK sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Kendal; Digitalisasi potensi dan peluang investasi Kabupaten Kendal; dan Kondusifitas wilayah. Secara keseluruhan KIK telah menarik 84 investor dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Cina Jerman, Thailand dan Hongkong. Sampai tahun 2023 ini sudah beroperasi 26 (dua puluh enam) perusahaan, dalam komisioning 6 (enam) perusahaan, dalam kontruksi 9 (sembilan) perusahaan dan dalam proses administrasi 43 (empat puluh tiga) perusahaan. Nilai investasi di KIK terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 nilai investasi mencapai Rp 3,14 triliun, tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 3,8 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 5,195 triliun dan pada tahun 2023 meningkat kembali realisasinya menjadi 6,398T. Dari sisi penyerapan tenaga kerja sampai tahun 2023 telah terserap 24.616 orang, sedangkan dari nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai US\$ 23.9 juta, dan pada tahun 2023 mencapai US\$ 50,5 juta. Di samping itu, investasi khususnya pada skala kecil dan menengah diluar KIK juga meningkat setiap tahunnya, sehingga diproyeksikan akan meningkat di tahun 2023, sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal.

Capaian Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial

Capaian sasaran ini diperoleh dari pengukuran indikator “Tingkat Kesejahteraan I”, pada tahun ini dari target 19,87 dapat terealisasi 19,87 atau tercapai 100,00%, melalui

Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, serta Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, langkah peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan. Dengan menerapkan kebijakan “Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal”.

Capaian Sasaran 7: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur

Sasaran ini diukur melalui indikator : “Harapan lama sekolah” dan “rata-rata lama sekolah” dengan masing-masing target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Sasaran 7

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	13,4	12,99	96,94
	rata -rata lama sekolah	8,05	7,73	96,02

melalui **Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pembinaan Perpustakaan**, dengan langkah strategi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin dan berprestasi, pemberian perlengkapan sekolah sesuai dengan SPM, peningkatan pendidikan 12 tahun, peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mendukung pembelajaran daring dengan mengaplikasikan *Learning Management System* pada jenjang pendidikan kewenangan kabupaten serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan, pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda, peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca.

Capaian Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah “Usia Harapan Hidup” dengan target 74,73 tahun, dapat terealisasi 74,58 sehingga capaiannya 99,80%. Melalui **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB), Program Pengendalian Penduduk, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.** Dengan langkah strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan keselamatan ibu dan anak, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) menuju UHC (*Universal Health Coverage*) perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB, serta peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi.

Grafik 3.7 Indek Pembangunan Manusia



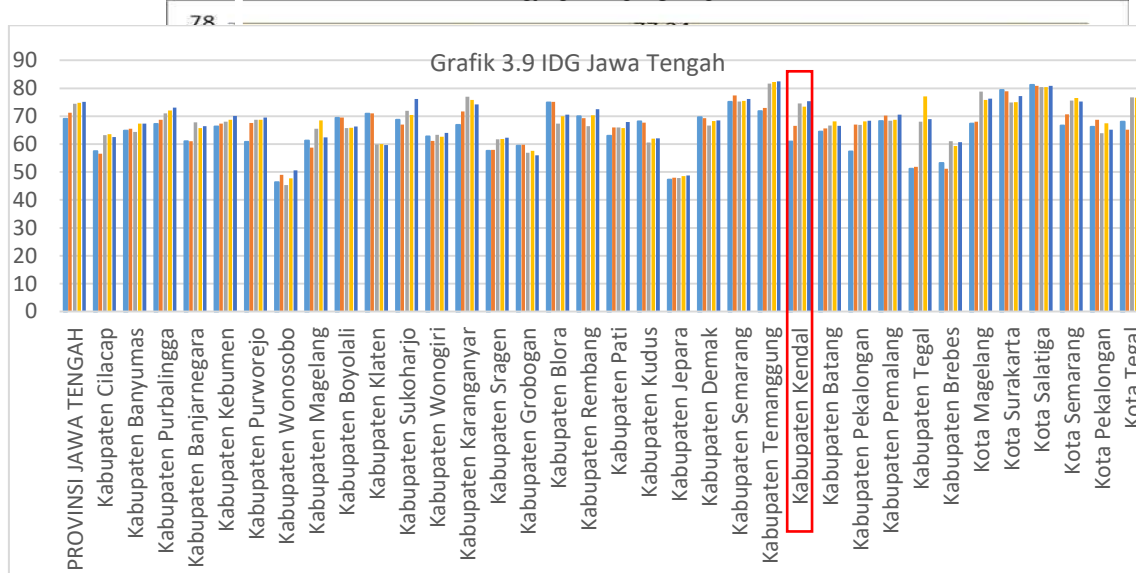
Sumber: BPS Tahun 2023

Capaian Sasaran 9 : Meningkatnya Pembangunan yang Berkeadilan dan Responsif Gender

Sasaran ini diukur melalui indikator “IPG (Indeks Pembangunan Gender)” dengan target 93,1 dan terealisasi 93,79 sehingga tercapai 100,74%. Menggunakan **Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program**

Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak, dengan langkah strategi peningkatan kesetaraan dan keadilan *gender* melalui peningkatan PUG disemua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

Grafik 3.8 Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2023

Capaian Sasaran 10: Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sasara ini adalah “Jumlah kasus konflik” dan “Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban” dengan capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Capaian Sasaran 10

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	0	0	100
	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	1	47,08	2125

Dilaksanakan dengan **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** dengan langkah strategi pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan belanegara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif, dan meningkatkan kententraman dan ketertiban umum melalui peneggakan perda, peningkatan disiplin aparat, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM.

Penurunan gangguan keamanan pada tahun 2020 ada 489 kasus, tahun 2021 ada 429 kasus, terjadi penurunan 60 kasus : ($60/489 \times 100\% = 12,26\%$), pada tahun 2022 ada 189 kasus, terjadi penurunan 240 kasus : ($240/429 \times 100\% = 55,94\%$), dan pada. tahun 2023 ada 100 kasus, sehingga terjadi penurunan 89 kasus atau ($89/189 \times 100\%$) menurun 47,08%.

Capaian Sasaran 11: Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya

Rincian atas capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran 11

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100	100	100
	Persentase cagar budaya yang diselestarikan	100	100	100

Dilaksanakan dengan **Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** dengan langkah strategi Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan cagar budaya, meningkatkan promosi budaya dan warisan budaya, mengadakan event kebudayaan sebagai salah satu sarana promosi kebudayaan, memperkenalkan budaya local kepada masyarakat melalui berbagai event yang dilaksanakan, menjaga keberadaan cagar budaya yang ada dan mempromosikan cagar budaya sebagai salah satu destinasi pariwisata maupun destinasi pembelajaran siswa.

Capaian Sasaran 12: Meningkatnya kualitas desa

Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran ini adalah “Jumlah Desa Mandiri” dengan target 3 dapat terealisasi 4 sehingga tercapai 133,33%. Dilaksanakan dengan **Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** dengan langkah strategi meningkatkan kualitas desa melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penataan desa, peningkatan administrasi desa, mendorong inovasi masyarakat melalui fasilitas dan kerjasama, peningkatan dan pembentukan BUMDES.

Capaian Sasaran 13: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Sasaran 13

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	92,78	83,113	89,58
	Persentase drainase kondisi baik	78,15	76,51	97,90
	Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	69,55	65,9	94,75
	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,00	86,00	102,38

Dilaksanakan dengan **Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan langkah strategi peningkatan konektivitas wilayah melalui kualitas infrastruktur jalan, drainase, pembangunan dan rehabilitasi, manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan pengembangan penerangan jalan kewenangan kabupaten, melalui peningkatan kelas jalan, peningkatan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan drainase rusak berat dan ringan serta pembangunan drainase baru, peningkatan kualitas pengendali banjir, longsor melalui peningkatan kapasitas dan kualitas irigasi dan drainase, peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman RTRW dan penegakan Perda RTRW.

Capaian Sasaran 14: Meningkatnya cakupan universal akses

Kebutuhan pokok utama masyarakat paling dominan yang menjadi indikator sasaran ini adalah “Persentase Capaian *Universal Acces*” dari target 96,17 dapat terealisasi 96,8 sehingga tercapai 100,65%. Dilaksanakan dengan ***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaa Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembang Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)*** dengan langkah strategi peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah sesuai SPM peningkatan penanganan perumahan dan kawasan kumuh melalui peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni dan tertata rapi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas perumahan dengan PSU kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM.

Capaian Sasaran 15: Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Rasio konektivitas” dengan target 0,79 dengan realisasi 0,9 dapat tercapai 113,92%. Dilaksanakan dengan ***Program Penyelenggaraan LLAJ*** dengan langkah strategi meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan transportasi seperti Bus Rapid transit dan layanan angkutan feeder pedesaan berbasis IT.

Capaian Sasaran 16: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Sasaran 16

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54,44	44,29	81,35
	Indeks kualitas udara	72,88	79,56	109,16
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,43	40,52	102,76

Dilaksanakan dengan **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota, dan Program Pengelolaan Persampahan** dengan langkah strategi meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati dengan RTH yang cukup dan berkualitas.

Capaian Sasaran 17: Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Indikator “Indeks Ketahanan Daerah (IKD)” ditargetkan 63 dapat terealisasi 70 sehingga tercapai 111,11%. Dilaksanakan dengan **Program Penanggulangan Bencana** dengan langkah strategi meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui menerapkan strategi pengurangan resiko dan kesiap siagaan penanganan bencana, penguatan desa tangguh bencana, peningkatan early warningsistem, dan prasarana penanganan bencana.

Capaian Sasaran 18: Meningkatkan birokrasi yang akuntabel

Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Sasaran 18

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	72,55	68,97	95.06
	Kasus Korupsi	0	0	100
	Opini BPK	WTP	WTP	100

Dilaksanakan dengan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Program Penelitian Dan**

Pengembangan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan langkah strategi

peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan pengukuran pencapaian kinerja memperkuat kelembagaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi, perencanaan, litbang dan peningkatan kualitas APBD Pembangunan Daerah.

Capaian Sasaran 19: Meningkatnya birokrasi yang Kapabel

Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Sasaran 19

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme ASN	76,7	79,02	70,37
	Indeks SPBE	3,43	2,95	104,47
	Indek kematangan kelembagaan	32,9	38,18	113,35

Dilaksanakan dengan ***Program Kepegawaian Daerah, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Sumberdaya, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Program Penyelenggaraan Pengawasan*** dengan langkah strategi meningkatkan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN, Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, Mendorong

optimalisasi E- Planning, EMonitoring, E-Musrenbang, EServices, E-Budgeting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, Peningkatan kematangan organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas, penjaminan mutu layanan daerah, ketaatan terhadap SOP, terukurnya kinerja daerah, manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, adanya pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas budaya organisasi.

Capaian Sasaran 20: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian sasaran ini adalah “Nilai Rata rata IKM” dengan target 87,77 dapat terealisasi 92,6 sehingga tercapai 105,50%. Dilaksanakan dengan ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*** dengan langkah strategi meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli, peningkatan penyelesaian pengaduan yang terintegrasi dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.

F

Analisa Permasalahan dan Rekomendasi

1. Tantangan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal

a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- 1) Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kendal menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 905.451 jiwa dengan laju pertumbuhan 0.18 % diperkirakan meningkat mencapai sekitar 940.296 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi.

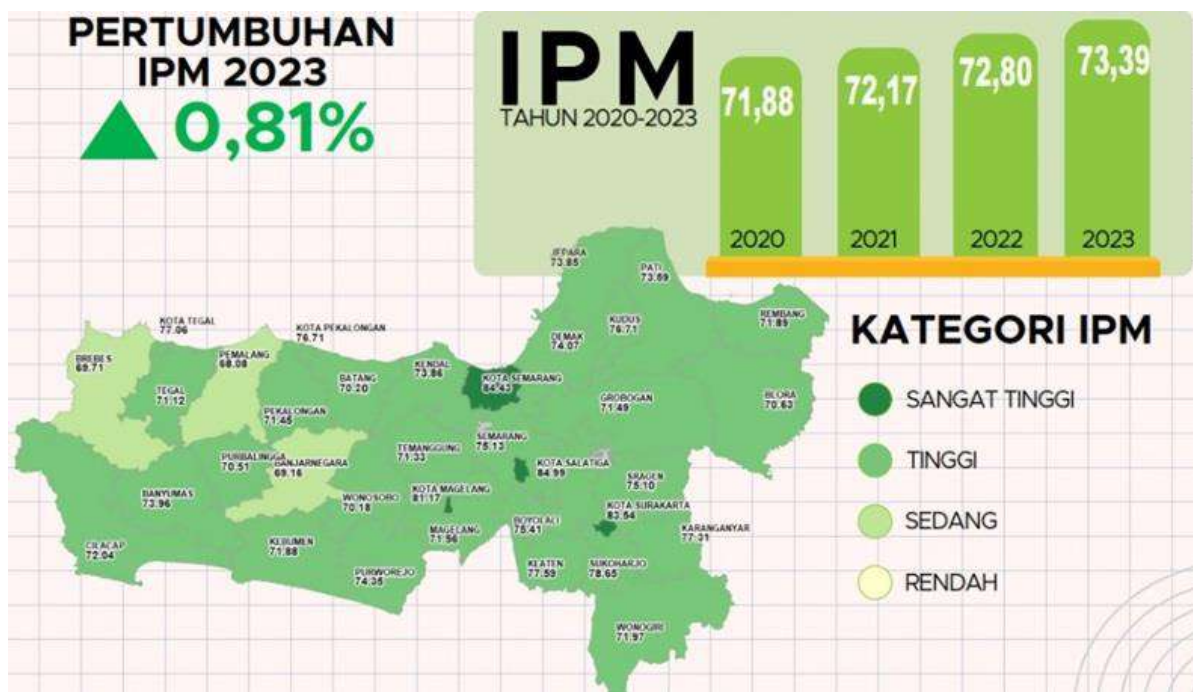
Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, penyebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kendal yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian Kabupaten Kendal. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah:

- a. mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat sosial ekonomi, dan gender;
- b. meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai;
- c. meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan
- d. mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular.

Namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, dan antarjenis kelamin.

Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kendal secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan kondisi demografi.



3) Kualitas hidup dan peran perempuan serta anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh :

- tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
- kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak.

Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga

adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olah raga. Tantangan lainnya adalah menurunkan

beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti :

- a) menipisnya nilai budaya dan agama;
 - b) menurunkan ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan
 - c) meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
- 4) Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan Kabupaten Kendal untuk dapat mempertahankan jati diri masyarakat ketimuran yang berpegang pada norma dan kesopanan, dan sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan agama serta peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.
- 5) Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.
- 6) Proses pelayanan sosial harus disertai upaya menggali potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat.
- Masih ada permasalahan sosial yang belum terjangkau karena keterbatasan kemampuan pemerintah.

b. Ekonomi

- 1) Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan

perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 4% per tahun dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah–daerah lain yang lebih maju.

- 2) Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Banyak usaha mikro yang terdampak dengan adanya penerapan PSBB dan PPKM.
- 3) Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan ekonomi antardaerah yang makin tinggi akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan. Untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing nasional sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.
- 4) Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal. Dalam angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen lebih berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.
- 5) Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi

kesenjangan. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

- 6) Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.
- 7) Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi perkembangan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan kemajuan IPTEK, tantangan yang dihadapi adalah :

- 1) meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat;
- 2) menciptakan rasa aman;
- 3) memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan;
- 4) memperkuat sinergi kebijakan IPTEK dengan kebijakan sektor lain;
- 5) mengembangkan budaya IPTEK di kalangan masyarakat;
- 6) meningkatkan komitmen daerah terhadap pengembangan IPTEK;
- 7) mengatasi degradasi fungsi lingkungan;
- 8) mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; dan
- 9) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya IPTEK, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan IPTEK.

d. Sarana dan Prasarana

- 1) Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air

harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

- 2) Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi daerah adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.
- 3) Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana teknologi informasi komunikasi tersebut dapat diterima masyarakat sesuai dengan pendidikan dan etika moral. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses penyalurannya untuk keperluan masyarakat karena belum ada kebijakan tarif

lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarananya.

- 4) Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah :
- a. melakukan reformasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
 - b. mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan
 - c. melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah.

Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

- 5) Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

e. Politik

- 1) Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.
- 2) Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi dan keadilan sosial. Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.
- 3) Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksana kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas

untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional.

- 4) Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi.

f. Hukum dan Aparatur

- 1) Tantangan ke depan di dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran merupakan syarat mutlak dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kendal.
- 2) Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya seiring dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi.
- 3) Proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

Globalisasi membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi Industri 4.0, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi (TI), meningkatkan perubahan manajemen pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk satu data daerah, e-government, e-procurement, ebusiness dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pandemi Covid-19 telah memacu penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk Pendidikan dan pelayanan publik) memanfaatkan TI dan tatanan baru dalam kesehatan dan mobilitas penduduk internal Kabupaten Kendal dan antar daerah.

g. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan dan pemanfaatan lahan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi :
 - a. arahan lokasi kegiatan;
 - b. batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; dan
 - c. efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan.Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.
2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perdesaan dan perkotaan perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisiknya, tetapi untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup

dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing desa / kelurahan maupun kota. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang ada selama ini dan belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kendal.

h. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis kesehatan. Ketiga krisis itu menjadi tantangan Kabupaten Kendal jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kendal, yaitu terancamnya moral masyarakat, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.
- 2) Meningkatnya luasan lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Hal ini akan menjadikan krisis lahan yang berarti bahwa kebutuhan akan lahan baik untuk aktivitas budidaya maupun untuk aktivitas lindung tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada sisi yang lain, terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut yang berupa

deforestasi hutan mangrove dan degradasi terumbu karang juga menyebabkan hilangnya potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Kasus pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam pembangunan Kabupaten Kendal yang berdaya saing.

G

Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kendal tahun 2023 menurut urusan Pemerintahan Daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.18 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja APBD Kabupaten Kendal Tahun 2023

Belanja Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	%
PENDAPATAN			
- PAD	543.918.935.935,83	437.899.634.626,73	124,21
- Pendapatan Transfer	1.901.070.071.641,00	1.819.497.040.063,00	104,48
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.006.095.349,00	7.957.250.000,00	100,61
JUMLAH PENDAPATAN	2.452.995.102.925,83	2.265.353.924.689,73	108,28
BELANJA			
- Belanja Operasi	1.760.554.299.151,00	1.700.561.372.435,00	103,53
- Belanja Modal	305.971.196.198,00	338.360.021.568,00	90,43
- Belanja Tak Terduga	3.319.381.024,00	2.426.449.400,00	136,80
- Belanja Transfer	405.248.396.377,00	457.666.175.846,00	88,55
JUMLAH BELANJA	2.475.093.272.750,00	2.499.014.019.249,00	99,04
SURPLUS/DEFSIT	(22.098.169.824,17)	(233.660.094.559,27)	9
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
- Penggunaan SILPA	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00	36,37
- Pencairan Dana Cadangan			
- Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			151,87
- Penerimaan Piutang Daerah			
Jumlah Penerimaan	151.226.927.832,73	415.810.417.392,00	36,37
Pengeluaran Pembiayaan			
- Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	133,33
- Penyertaan Modal Pemda	6.000.000.000,00	15.936.000.000,00	37,65
- Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	26.000.000.000,00	30.936.000.000,00	84,04
PEMBIAYAAN NETTO	125.226.927.832,73	384.874.417.392,00	32,54
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	103.128.758.008,56	151.214.322.832,73	68,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal Unaudited BPK RI Tahun 2023

2. Hambatan dan solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya

yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/ retribusi, potensi pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum optimal pemanfaatannya, kurang koordinasi terkait pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, sehingga pencairan dana transfer yang didasarkan progres pekerjaan tidak tercairkan. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain kurang tertibnya administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah dalam mendukung PAD. Untuk melaksanakan amanat RPJMD yaitu adanya peningkatan target PAD terutama sektor pajak daerah, beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan realisasi target pendapatan telah dilakukan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan dan penggunaan sistem informasi untuk lebih memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi.
2. Terus memperbaiki sistem dan alur digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan fitur dan kerjasama baik dengan lembaga keuangan maupun dengan non bank.
3. Penyelenggaraan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
4. Sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi dan penerapan self assesment serta penegakan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
5. Mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi

pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

6. Peningkatan koordinasi antara pengelola pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas SKPD.
7. Pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan BPD Jawa Tengah.
8. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan dana transfer.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain tidak optimalnya realisasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga, adanya pegawai yang berakhir masa kerjanya (pensiun) sehingga anggaran belanja pegawai, tunjangan penghasilan yang tidak optimal terserap, biaya pemungutan PBB, insentif pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, disamping itu juga ada efisiensi/penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah pagu anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2023 antara lain:

1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
2. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila lambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.
3. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana pemerintah lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.

4. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya.
5. Beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang cukup tinggi telah diupayakan bisa terpenuhi secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan beban yang lebih berat pada tahun berikutnya.
6. Memenuhi prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah.

BAB IV

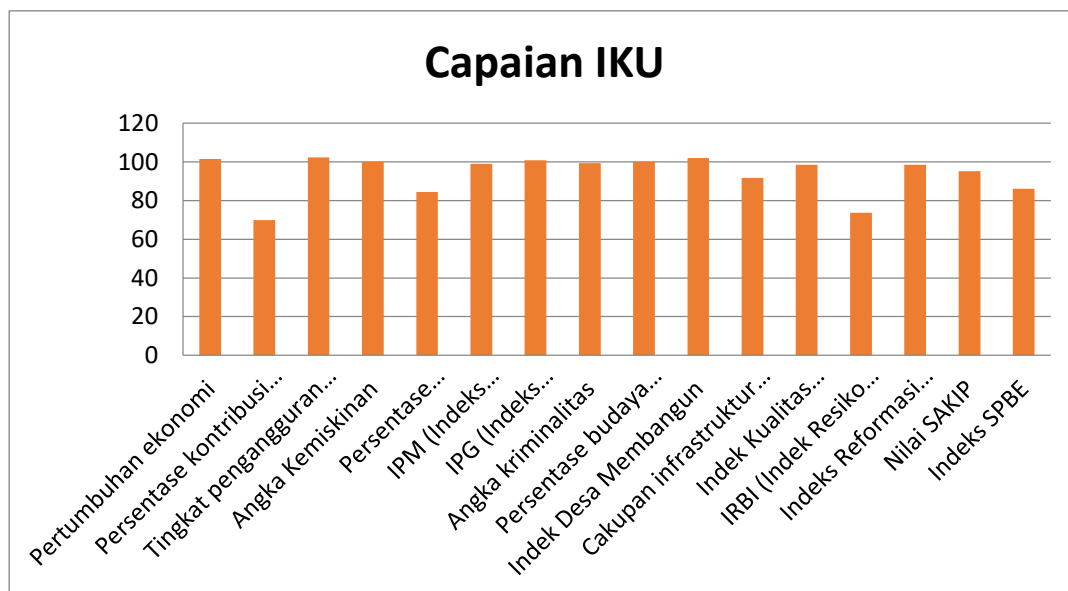
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

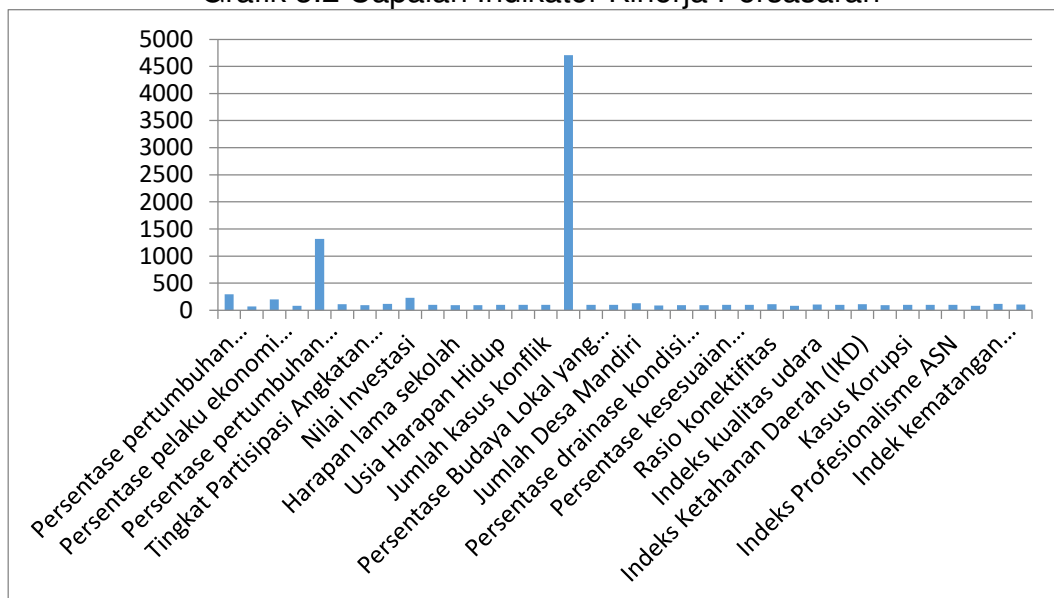
Hasil pengukuran pada 20 (dua puluh) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja (outcomes) yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal dan kontribusinya terhadap capaian visi dan misi daerah pada tahun 2023, sebagai berikut :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2023

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran (100%) telah dapat direalisasikan dengan Baik dengan rata-rata capaian kinerja 227,98%. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persasaran



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2023

Tabel 4.1 Capaian Persasaran

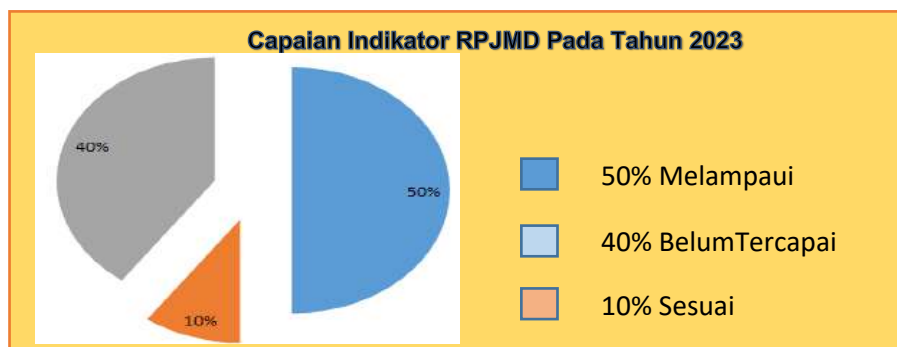
No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah	5 indikator
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 indikator
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1 indikator
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	1 indikator
5	Meningkatnya nilai investasi	1 indikator
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1 indikator
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	2 indikator
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 indikator
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	1 indikator
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2 indikator
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	2 indikator
12	Meningkatnya kualitas desa	1 indikator

No	Sasaran	Jumlah Indikator
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	4 indikator
14	Meningkatnya cakupan universal akses	1 indikator
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 indikator
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3 indikator
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1 indikator
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	3 indikator
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	3 indikator
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1 indikator

Dengan demikian pada tahun 2023 rata-rata capaian kinerjanya 274,11% jika disandingkan dengan target akhir RPJMD masih terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja atau 62,5% yang belum tercapai, sehingga diperlukan perhatian lebih pada tahun-tahun berikutnya, indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD
2. Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB
3. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
4. Angka kriminalitas
5. IRBI (Indek Resiko Bencana)
6. Indek Kualitas Lingkungan Hidup
7. Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas
8. Indeks Reformasi Birokrasi
9. Nilai SAKIP
10. Indeks SPBE

Capaian indikator tersebut pada tahun 2023 lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pasca pandemi covid-19.



Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal 2023.

Untuk mensikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah meningkatkan koordinasi perencanaan kinerja antar instansi terkait dalam bidang tersebut, melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan sarana prasarana, dan sarana penunjang lainnya, terutama yang berada di lingkungan sekitarnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi untuk bersama-sama dalam membangun sektor tersebut serta tetap memelihara dan menjaga lingkungan terutama sarana prasarana umum, yang memiliki fungsi ekologi, sosial ekonomi dan estetika.

Dalam Tahun Anggaran 2023, untuk pencapaian kinerja 20 (Dua puluh) sasaran strategis dan 36 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.575.391.457.549,00. dan realisasi senilai Rp2.474.852.103.550,00 atau 96,10%, mengalami penurunan Rp24.161.915.699,00 atau 0,97% dari realisasi TA 2022 senilai Rp2.499.014.019.249,00.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, dan khususnya untuk tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Kendal Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaikinya pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kendal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja dan Rekomendasi

Dari analisis yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan dan tantangan yang dapat dipedomani untuk perencanaan kinerja pembangunan ke depan. Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan data secara terpadu dan sistematis
2. Melakukan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pimpinan OPD beserta jajarannya
3. Mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia secara lebih optimal
4. Menggunakan hasil evaluasi terdahulu dan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai *guide* untuk perencanaan ke depan

Kendal, 24 Maret 2024
BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO, B.Sc.

Lampiran

Beberapa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2022-2023 yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kendal, antara lain sebagai berikut :

1. Juara Pertama sebagai Kabupaten/Kota terbaik dalam melaksanakan Praktik Audit Kasus Stunting Indonesia tahun 2023 dari BKKBN RI
2. Penghargaan dari Ombudsman Kategori A (Zona Hijau) Opini Kualitas Tertinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai kepatuhan 93,47 dan menjadi Peringkat 7 Nasional
3. Penghargaan MURI selaku pemrakarsa pembangun gedung Perpustakaan Daerah Kendal. Muri mencatat, Gedung Perpustakaan Daerah Kendal terluas tingkat kabupaten, dengan luas tanah 4060 meter persegi. Untuk lantai 1 seluas 1.132 meter persegi dan lantai 2 seluas 932 meter persegi.
4. Penghargaan Desa Bumiayu Kecamatan Weleri sebagai 10 Desa/Kelurahan terbaik. Tingkat Nasional dalam Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
5. Penghargaan Top Digital Implementation 2023 Level Stars 4.
6. Penghargaan Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
7. Penghargaan terbaik pertama kategori Kriteria Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri pada penganugerahan apresiasi “Resilience and Sustainable Industri tahun 2023” oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
8. Penghargaan “Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Nindya” Merupakan Penghargaan atas komitmen dan peran pimpinan dalam mewujudkan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Penghargaan Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jateng sebagai badan publik Pemerintah Daerah.
10. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

11. Peringkat II Nasional Railways Safety Award dari Ditjen Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.



12. Publik Service Of The Year Jawa Tengah 2022 dari Mark Plus (perusahaan Konsultan Pemasaran Terkemuka ASEAN)



13. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (Tingkat Pratama) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak



14. Juara III Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah (Aspek Sumber Daya Manusia) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak



15. Peringkat 7 nasional Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) oleh Ombudsman RI.



16. Peringkat 3 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tingkat Provinsi Jawa Tengah



17. Kabupaten Kendal sebagai salah satu dari 20 Simpul Jaringan Pilot Project Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)



18. Bupati Kendal Sebagai Top Pembina BUMD pada TOP BUMD Award 2022 dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah



19. Juara II Tingkat Nasional Cabor Atletik kelas 100 M GAWANG - U18 a.n.Kirana Anindya Sitaresmi Pada Kejuaraan Nasional Atletik Tahun U18 / U20/ Senior Tahun 2022



20. Juara II Tingkat Nasional Cabor Atletik kelas LOMPAT JANGKIT - SENIOR
a.n. AGUNG WAHYUDI KEJUARAAN NASIONAL ATLETIK TAHUN U18 /
U20/ SENIOR TAHUN 2022



21. Anugerah Desa Wisata (Desa Ngesrep Balong Kec. Limbangan) 100 Besar
Tingkat Nasional dari Kemenparekraf

